



Research Article

Dinamika Pemekaran Wilayah Dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Daerah Di Lampung Selatan

Abdul Halim¹, Dita Permata Sari², Kalya Maharani³, Mona Safitri⁴, Ni Luh Lola Mika Fatmawati⁵

1. Program Studi PPKn Universitas Lampung, Indonesia; abdulhalim@fkip.unila.ac.id 
2. Program Studi PPKn Universitas Lampung, Indonesia; ditapermata682@gmail.com
3. Program Studi PPKn Universitas Lampung, Indonesia; kallyamaharani949@gmail.com
4. Program Studi PPKn Universitas Lampung, Indonesia; monasfitri2206@gmail.com
5. Program Studi PPKn Universitas Lampung, Indonesia; fatmawatilola@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 12, 2024
Accepted : October 15, 2025

Revised : September 24, 2025
Available online : November 16, 2025

How to Cite: Abdul Halim, Dita Permata Sari, Kalya Maharani, Mona Safitri, & Ni Luh Lola Mika Fatmawati. (2025). Dinamika Pemekaran Wilayah Dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Daerah Di Lampung Selatan. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(2), 125-132. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.12>

The Dynamics of Regional Expansion and Its Implications for Regional Government in South Lampung

Abstract. Territorial expansion (pemekaran wilayah) is a form of decentralization within the framework of regional autonomy aimed at improving the efficiency of public services, accelerating development, and shortening the span of government control. This article aims to analyze the dynamics of territorial expansion in South Lampung Regency and its implications for regional

governance. The method used is a qualitative approach involving literature studies, documentation, and in-depth interviews with several key informants. The findings indicate that territorial expansion in South Lampung, such as the establishment of Pesawaran and Pringsewu Regencies, has had a significant impact administratively, in terms of public service delivery, as well as on local socio-political dynamics. However, challenges such as elite interest conflicts, development disparities, and institutional capacity constraints remain obstacles to achieving effective and efficient governance. Therefore, continuous evaluation of expansion policies and the strengthening of regional government capacity are necessary.

Keywords: Territorial Expansion, Regional Autonomy, Local Governance, South Lampung, Governance.

Abstrak. Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Selatan serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah di Lampung Selatan, seperti pembentukan Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu, memberikan dampak signifikan baik dari sisi administratif, pelayanan publik, maupun dinamika sosial-politik lokal. Namun demikian, tantangan seperti konflik kepentingan elit, ketimpangan pembangunan, dan kapasitas kelembagaan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pemekaran serta penguatan kapasitas pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Otonomi Daerah, Pemerintahan Lokal, Lampung Selatan, Tata Kelola.

PENDAHULUAN

Pasca reformasi, Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan, khususnya melalui penerapan otonomi daerah yang mendorong lahirnya berbagai daerah otonom baru. Pemekaran wilayah menjadi salah satu instrumen kebijakan strategis yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Dalam konteks ini, pemekaran wilayah juga mencerminkan respons terhadap dinamika sosial-politik, kebutuhan administratif, serta aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang mengalami pemekaran setelah era reformasi. Pemekaran tersebut menghasilkan dua daerah otonom baru, yakni Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007 dan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2008. Keduanya sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan. Dorongan untuk melakukan pemekaran wilayah ini tidak terlepas dari faktor-faktor seperti luasnya wilayah, kebutuhan pemerataan pembangunan, keinginan masyarakat akan pelayanan yang lebih dekat dan cepat, serta harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif, pemekaran wilayah dilandasi oleh kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pemekaran tidak selalu menghasilkan hasil yang sesuai harapan. Beberapa tantangan muncul, seperti keterbatasan kapasitas fiskal daerah baru, kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta lemahnya tata kelola birokrasi dan pelayanan publik. Dampak dari pemekaran juga dirasakan oleh pemerintah daerah induk, baik dalam hal pembagian sumber daya, pengelolaan administrasi, maupun dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Pemekaran wilayah di Lampung Selatan merepresentasikan dinamika kompleks dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Di satu sisi, pemekaran membawa peluang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Di sisi lain, terdapat sejumlah implikasi administratif, politik, sosial, dan ekonomi yang memerlukan pengelolaan secara cermat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika pemekaran wilayah di Lampung Selatan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di tingkat lokal.

Pemekaran wilayah tidak dapat dilepaskan dari berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Keinginan untuk memperoleh akses yang lebih adil terhadap sumber daya pembangunan, representasi politik yang lebih baik, dan pelayanan publik yang lebih optimal merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru. Namun, pelaksanaan pemekaran wilayah sering kali menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan infrastruktur pemerintahan, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, dan ketimpangan fiskal antarwilayah.

Dalam konteks Lampung Selatan, pemekaran wilayah tidak hanya berdampak pada struktur administratif dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap pembangunan sosial ekonomi dan hubungan antarlembaga di tingkat lokal. Pemerintah daerah dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan ini melalui penyesuaian kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemekaran juga memunculkan tantangan dalam menjaga identitas dan kohesi sosial masyarakat yang sebelumnya berada dalam satu kesatuan administratif.

Oleh karena itu, kajian mengenai pemekaran wilayah di Lampung Selatan menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses, dinamika, serta implikasi dari kebijakan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, serta menjadi masukan yang bernilai bagi perumusan kebijakan otonomi daerah ke depan, khususnya dalam merancang strategi pemekaran wilayah yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dinamika pemekaran wilayah dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan narasumber kunci seperti pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Analisis dilakukan secara naratif dengan

menggabungkan berbagai sumber informasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pemekaran Wilayah di Lampung Selatan

Pemekaran wilayah merupakan bagian dari dinamika politik dan administrasi di Indonesia pasca-reformasi. Hal ini didorong oleh keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan menyesuaikan kondisi geografis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pemekaran wilayah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 mengatur tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah (Ahmad Muzawir, 2008).

Di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu wilayah yang mengalami pemekaran. Pada tahun 2007, Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007, yang memisahkan tujuh kecamatan dari Lampung Selatan. Kemudian, pada tahun 2008, Kabupaten Pringsewu dibentuk sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Pemekaran ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan menyesuaikan kondisi geografis. Namun, dinamika pemekaran juga melibatkan persaingan politik lokal, kepentingan elite, dan tekanan masyarakat sipil. Dalam beberapa kasus, tuntutan pemekaran diwarnai mobilisasi politik, bahkan konflik horizontal antar kelompok.

Pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa) merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik serta untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Pemekaran biasanya terjadi di wilayah dengan cakupan geografis yang luas dan jumlah penduduk yang tinggi, namun juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik lokal. Dalam konteks ini, pemekaran daerah dianggap sebagai bentuk realisasi dari prinsip demokrasi dan desentralisasi yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur pembagian daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah induk mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pesawaran (UU No. 33 Tahun 2007) dan Kabupaten Pringsewu (UU No. 48 Tahun 2008). Tujuan utamanya adalah agar pelayanan publik dapat dijangkau dengan lebih cepat, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Selain itu, pemekaran diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

Namun demikian, pemekaran wilayah juga tidak terlepas dari tantangan. Pemerintah daerah baru sering menghadapi persoalan klasik seperti minimnya infrastruktur dasar, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, serta rendahnya kapasitas fiskal. Lampung Selatan sebagai daerah induk juga merasakan dampaknya, terutama dalam hal kehilangan sebagian wilayah potensial dan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, proses pemekaran juga kerap disusupi kepentingan politik elit lokal dan dijadikan alat mobilisasi massa, yang dapat memicu

konflik horizontal jika tidak dikelola secara bijak (Firman, 2014). Menurut penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), banyak daerah hasil pemekaran yang belum mampu mandiri secara fiskal dan tetap bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah solusi instan, tetapi memerlukan perencanaan matang, evaluasi komprehensif, serta dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

Implikasi Terhadap Pemerintahan Daerah

Implikasi Terhadap Struktur Pemerintahan Daerah

Pemekaran wilayah mendorong perubahan dalam struktur organisasi pemerintahan daerah. Ini meliputi pembentukan perangkat daerah baru, rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), hingga penyusunan ulang sistem administrasi yang memerlukan proses penyesuaian cukup kompleks serta anggaran yang besar. Pemekaran mengharuskan pemerintah membentuk lembaga-lembaga baru seperti dinas, badan, dan sekretariat daerah, yang masing-masing membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran operasional. Penyesuaian ini juga mengubah tata kelola pemerintahan, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi yang harus dirumuskan kembali secara sistematis. Seringkali terjadi duplikasi kewenangan atau kekosongan jabatan struktural pada masa transisi, yang bisa menghambat jalannya roda pemerintahan.

Selain itu, pemekaran berdampak pada redistribusi personel ASN dari daerah induk ke daerah hasil pemekaran, yang kadang menimbulkan ketimpangan kompetensi dan beban kerja. Diperlukan regulasi internal untuk memastikan efektivitas fungsi dan koordinasi antarlembaga pemerintahan yang baru terbentuk. Dalam beberapa kasus, pengisian jabatan struktural juga bisa menimbulkan konflik kepentingan atau tarik-menarik antar elite politik lokal. Penataan struktur birokrasi yang baik menjadi kunci agar daerah hasil pemekaran mampu menjalankan tugas pemerintahan secara efektif dan efisien. Struktur pemerintahan yang tidak siap dapat memperlambat pembangunan dan pelayanan publik. Karenanya, perlu perencanaan matang berbasis kajian akademik sebelum pemekaran dilakukan agar struktur pemerintahan yang dibentuk benar-benar fungsional dan adaptif. Hadi, S. (2016)

Implikasi Terhadap Pelayanan Publik

Tujuan utama pemekaran adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pada masa awal, sering kali terjadi kesenjangan pelayanan akibat keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di wilayah baru. Pemerintah daerah perlu merancang strategi pelayanan adaptif berbasis potensi lokal. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan sering kali belum siap secara infrastruktur maupun teknis. Kondisi ini diperparah jika daerah hasil pemekaran belum memiliki kantor pelayanan, sistem informasi, atau tenaga ahli yang memadai. Pemerintah pusat maupun provinsi harus memberikan dukungan berupa bantuan teknis dan pendanaan untuk mempercepat pembentukan sistem layanan publik. Selain itu, pelibatan masyarakat sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan yang mendesak dan sesuai

karakteristik lokal. Pemekaran yang tidak diiringi dengan perbaikan kualitas layanan justru akan memunculkan ketidakpuasan dan potensi konflik sosial. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan pelayanan, misalnya melalui pelayanan digital dan mobile service. Namun, teknologi saja tidak cukup tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran operasional yang stabil. Pelayanan publik juga harus dijalankan secara adil agar tidak terjadi diskriminasi antara wilayah induk dan wilayah pemekaran. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap kualitas dan pemerataan pelayanan publik menjadi hal krusial dalam proses pemekaran wilayah. Lestari, I. A. (2013)

Implikasi Terhadap Keuangan Daerah

Pembentukan daerah baru menimbulkan beban fiskal tambahan, terutama dalam hal pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar dan operasional pemerintahan. Daerah hasil pemekaran biasanya masih memiliki PAD rendah, sehingga sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan Dana Desa. Ketergantungan fiskal ini membuat pemerintah daerah hasil pemekaran sulit mandiri secara keuangan dalam waktu singkat. Selain itu, pemekaran dapat memicu ketimpangan fiskal antara daerah induk dan daerah hasil pemekaran jika pembagian aset dan kewajiban tidak dilakukan secara adil. Daerah baru juga menghadapi tantangan dalam menyusun APBD, mengingat terbatasnya kapasitas perencanaan dan manajemen keuangan daerah. Dibutuhkan pelatihan bagi aparatur keuangan dan pendampingan dari pemerintah provinsi agar penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Pemekaran tanpa persiapan fiskal yang memadai berisiko menyebabkan keterlambatan pembangunan dan buruknya pelayanan publik. Perlu strategi pengembangan potensi lokal untuk meningkatkan PAD, seperti optimalisasi sektor pariwisata, pertanian, atau usaha mikro. Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Dalam jangka panjang, keberlanjutan fiskal menjadi indikator penting keberhasilan pemekaran wilayah. Jika tidak diantisipasi, beban fiskal yang besar bisa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menimbulkan ketergantungan jangka panjang terhadap pusat. Pohan, M. N. (2021)

Implikasi Terhadap Pembangunan Wilayah

Pemekaran seringkali diharapkan mempercepat pembangunan. Namun, realisasinya sangat tergantung pada kapasitas perencanaan pembangunan daerah dan dukungan dari pemerintah pusat. Tanpa koordinasi yang baik, pemekaran dapat menyebabkan ketimpangan dan fragmentasi wilayah. Daerah hasil pemekaran memiliki peluang untuk menentukan prioritas pembangunan sendiri sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Namun, kurangnya data, tenaga ahli, dan pengalaman dalam perencanaan pembangunan seringkali menjadi kendala utama. Pemerintah daerah perlu membangun sistem perencanaan yang partisipatif dan berbasis data agar program pembangunan tepat sasaran. Kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak di wilayah baru juga menuntut kecepatan dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Jika tidak

direncanakan dengan baik, pemekaran justru dapat memperbesar kesenjangan antarwilayah dan memunculkan wilayah-wilayah marginal.

Pembangunan yang tidak merata dapat memicu migrasi internal dan tekanan terhadap fasilitas umum di wilayah yang lebih berkembang. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk mendukung pembangunan wilayah baru secara terpadu dan berkelanjutan. Penting juga untuk mengintegrasikan isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan agar tidak merusak ekosistem lokal. Dengan pendekatan pembangunan inklusif dan berkelanjutan, pemekaran dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah baru. Hidayat, S., & Rudianto, E. (2018)

KESIMPULAN

Pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Selatan merupakan refleksi dari dinamika pelaksanaan otonomi daerah pascareformasi yang bertujuan mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pembentukan Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu menjadi langkah konkret dalam merespons kebutuhan geografis, administratif, dan aspirasi lokal. Namun demikian, pemekaran ini membawa implikasi yang kompleks, baik dalam hal tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, keuangan daerah, maupun dinamika sosial-politik.

Diperlukan kebijakan yang lebih holistik dan berbasis evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan awal pemekaran dapat tercapai secara optimal. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme ASN, pengelolaan keuangan yang transparan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan kunci keberhasilan pemekaran wilayah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam membina daerah hasil pemekaran agar tidak hanya mampu berdiri secara administratif, tetapi juga mampu berkembang dan mandiri secara sosial dan ekonomi. Tanpa itu, pemekaran justru berisiko menjadi beban baru dalam tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan demokratis.

SARAN

Kajian ini menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pemekaran wilayah, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pemekaran dilandasi oleh kajian komprehensif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan geografis, tetapi juga kesiapan fiskal, kapasitas sumber daya manusia, serta potensi konflik sosial-politik yang mungkin muncul. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan pada daerah hasil pemekaran sangat krusial agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan mandiri, tanpa ketergantungan berlebih pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dalam jangka panjang, diperlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan strategi pemekaran wilayah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muzawwir, "Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000", Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, h. 53.
- Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pelayanan Publik (Studi di Kantor Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 105–115.
- Dampak Pemekaran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 123–134.
- Pemekaran daerah dalam perspektif otonomi daerah di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6(2), 259–277.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Perencanaan Wilayah dan Implikasi Pemekaran Daerah. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 29(1), 87–99.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.